

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, O., & Tuli, H. (2017). Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (1), April 2017: 61-70*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Afdi, M., & Purnomo, K. (2011). Potensi Penerimaan Pajak dari Underground Economy di Indonesia. *Majalah Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 15 No.2.
- Arfin. (2018). Risiko dan Peluang Terjadinya Korupsi di Sektor Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Azwar & Wawan, A. (2017). Analisis Underground Economy Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak. *Jurnal Info Artha Vol.1, No.1 Hal. 60-78*.
- Achmadi, G. (2018). *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Jakarta: Yudhistira.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Berita Resmi Statistik. *Ekonomi Indonesia Tahun 2016 Tumbuh 5.02 Persen Lebih Tinggi Dibanding Capaian Tahun 2015 Sebesar 4,88 Persen*.
- Boediono. (1994). *Teori Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Baumol, W. (1952). The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach. *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 66, Issue 4, 545-556.
- Bank Indonesia, (2018). *BI 7-day (Reverse) Repo Rate*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/penjelasan/Contents/Default.aspx>. [23 November 2018].
- CNN. (2018). *Target Pajak Gagal, Jokowi Salahkan Shadow Economy*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180817061118-532-322964/target-pajak-gagal-jokowi-salahkan-shadow-economy> [ 9 Agustus 2019 ].
- CNN. (2019). *Benahi Sistem Dahulu, Turunkan Tarif PPh Badan Kemudian*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190109115636-532-359526/benahi-sistem-dahulu-turunkan-tarif-pph-badan-kemudian> [ 11 Agustus 2019 ].
- Damodar, G & Dawn, P,. (2009). *Basic Econometric*. New York: McGraw –Hill.
- Detikfinance. (2014). *Masyarakat RI Masih Gemar Pakai Uang Tunai, PPATK : Sumber Korupsi*. Diakses dari <http://finance.detik.com/moneter/d-2790189/masyarakat-ri-masih-gemar-pakai-uang-tunai-ppatk-sumber-korupsi> [27 Januari 2018].
- Detikfinance. (2018). *Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun, 91% dari Target*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target> [ 9 Agustus 2019 ].
- Devas, N. (2009). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas UI Press.
- Direktorat Jenderal Perpajakan. (2010). *Laporan Tahunan 2010: Bekerja dengan Hati, Mengukur Langkah dengan Pasti*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perpajakan. (2011). *Laporan Tahunan 2011: Membina Tanggung Jawab Melalui Optimisme*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perpajakan. (2012). *Laporan Tahunan 2012: Harmonisasi Membangun Negeri*. Jakarta.

- Direktorat Jenderal Perpajakan. (2013). *Laporan Tahunan 2013: Committed to Stronger Presence*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perpajakan. (2014). *Laporan Tahunan 2014: Upholding The Spirit of Revitalization for Integrated Transformation*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perpajakan. (2015). *Laporan Tahunan 2015: Membangun Budaya Taat Pajak*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perpajakan. (2016). *Laporan Tahunan 2016: Kontribusi Strategis Membangun Bangsa Melalui Amnesti Pajak*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perpajakan. (2017). *Laporan Tahunan 2017: Transparansi Membangun Negeri*. Jakarta.
- Faal, E. (2003). Currency Demand, the Underground economy, and Tax Evasion: the Case of Guyana. *International Monetary Fund Working Paper*.
- Fauzi, G. (2014). Mahfud MD: Duit Pajak Habis Dikorupsi. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141007183236-12-5668/mahfud-md-duit-pajak-habis-dikorupsi> [15 Mei 2018].
- Feige, E. (1990). Defining and Estimating Underground and Informal Economies: *The New Institutional Economic Approach*, *World Development*, 18, no. 7, pp. 989 – 1002.
- Febriani, E. (2017). *Pembatasan Transaksi Tunai dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dihubungkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi, A. (2004). *Krisis dan Underground Economy di Indonesia*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Gutmann, P.M. (1977). The subterranean economy. *Financial Analysts Journal* 34, 26-27.
- Halim, A. (2008). *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermana, B. (2011). *Black Economy, Seberapa Hitam Indonesia*. Diakses dari [https://www.kompasiana.com/budihermana/black-economy-seberapa-hitam-indonesia\\_5500e56ba333114e755124f4](https://www.kompasiana.com/budihermana/black-economy-seberapa-hitam-indonesia_5500e56ba333114e755124f4) [27 Januari 2018].
- Heru, R. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang Kartal di Indonesia Tahun 2000 – 2013*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Iwan, A. (2016). *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak*. Samarinda: Universitas Mulawarman Indonesia.
- Jatmiko, B. (2011). Penerimaan Pajak dari Underground Economy Digenjot. *Bisnis Indonesia*. Hal.2.
- Johnson, S., & Kaufmann, D., (1997). The Unofficial Economy in Transition. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2.
- Kartika, R. (2016). *Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Indonesia*. Bandung: Universitas Widyatama.

- Kartini, U. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2016*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Komarulloh. (2013). *Analisis Permintaan Uang di Indonesia 2000-2012*. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Manalu, J., (2019). *Potensi Kehilangan Pajak dari Sektor Perikanan Diperkirakan Capai Rp5 Triliun*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/99/1120160/potensi-kehilangan-pajak-dari-sektor-perikanan-diperkirakan-capai-rp5-triliun> [30 Oktober 2019]
- Mankiw, G. (2007). *Makroekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mubarok, A., (2016). *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong*. Banten: Universitas Pamulang.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010. *Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan*. 27 Desember 2010. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2011. *Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dan/atau Minyak Goreng awit Curah di Dalam Negeri*. 4 April 2011. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tahun 2008. *Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penhapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. 29 April 2008. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012. *Penatausahaan dan Pindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi*. 1 Februari 2012. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. 22 Oktober 2012. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013. *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat*. 26 Agustus 2013. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013. *Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 26 Agustus 2013. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. 29 Juni 2015. Jakarta.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015. *Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 8 Juni 2015. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. 22 Juni 2016. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 Tahun 2013. *Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau*. 1 Juli 2013. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya*. 8 Agustus 2016. Jakarta.
- Purnomo, K. (2010). *Estimasi Underground Economy di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Rahayuanti, S & Malisan, L. (2018). *Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. *Pengampunan Pajak*. 1 Juli 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5899. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 16 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Rasbin. (2013). *Ekspektasi Potensi Underground Economy di Indonesia*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.
- Samuda, A. (2016). Underground Economy in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 19, Nomor 1.
- Sapardi, T. (2013). Estimasi Potential Loss Penerimaan Pajak dari Kegiatan Underground Economy dengan Pendekatan Moneter. *Media Ekonomi Vol. 21, No. 1*.
- Santioso, L. (2008). Peningkatan Pajak Melalui Program Sunset Policy, *Jurnal Ekonomi, Tahun XIII, No. 2, Juli 2008, hlm. 205*.
- Schneider, Friedrich & Enste, D. H. (2000). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. *Journal of Economic Literarute*, Vol.38, pp. 77-114.
- Sukarno. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang Kartal Riil di Indonesia Tahun 1996 – 2008*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Schneider, F., & Hametner, B. (2007). *The Shadow Economy in Colombia : Size and Effects on Economic Growth. Johannes Kepler University Working Paper No. 0703 (January)*. Austria : Johannes Kepler University.
- Solikin, S. (2017). *Pengertian, Penciptaan dan Peranan Uang dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Susanto. H. (2011). *Underground Economy*. Jakarta: Baduose Media.
- Supramono & Theresia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Syahroni. (2018). *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*. Jakarta: Deepublish.
- Tanzi, V. (1983). *The Underground Economy in the United States: Annual Estimates, 1930-80. International Monetary Fund Staff Paper. Vol 30. No.2*.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia
- Yunita, M. (2013). *Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.